

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II ( Fenafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniaadaan, pemberat dan peringan, kejahatan aduan, perbarengan dan ajaran kausalitas)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007
- Andi Hamzah, *Peranan Hukum dan Peradilan*. Bina Aksara. Jakarta. 2003
- Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Penerbit Genta Publisihing, Jakarta. 2010
- Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung. 2011.
- Barda Nawawi Arief, *kapita selekta Hukum Pidana*, cet I, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Firman Wijaya, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap Dalam Praktek*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015.
- H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta. 2014.
- Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika. Jakarta. 2002.

- Martiman Prodjo Hamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Jakarta: Timpani Publishing, Jakarta, 2010.
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2014.
- Moeljatna, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Bina Aksara. Jakarta. 2007.
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Mediatama, Palangkaraya, 2009.
- Robert Klitgaard, dkk, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008.
- Russel Butar-butar, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dibidang Konstruksi*, Gramata Publishing, Bekasi, 2006.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002.
- Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Yogyakarta. 1997.
- Surachmin, *Strategi dan Tehnik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta. 2011.
- Suswinarno, *Mengantisipasi Resiko Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* Jakarta: Visimedia, Jakarta, 2013.
- Syam sul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* UIP. Jakarta. 2004.
- Transparency International Indonesia, *Strategi Memberantas Korupsi (Elemen Sistem Integritas Nasional)*, Yayasan Obor Rakyat, Jakarta. 2003.

World Bank Office Jakarta, *Memerangi Korupsi di Indonesia Memperkuat Akuntabilitas Untuk Kemajuan*, World Bank Office. Jakarta, 2003.

## **B. Undang-Undang**

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **C. Internet**

<http://beniharmoniharefa.blogspot.com/2014/05/pertanggungjawaban-pidana-kasus-bbi.html>, Diakses tanggal 15 Januari 2017 Pukul 15.00.00 Wib

<http://developmentcountry.blogspot.com/2009/11/analisa-kasus-penyalahgunaan-wewenang.html>, Diakses tanggal 19 Desember 2016 Pukul 20.15.00 Wib

<http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, Diakses tanggal 19 Desember 2016 Pukul 21.00.00 Wib

<http://www.tahupedia.com/content/show/587/10-Negara-Terkorup-Di-Dunia>. Diakses tanggal 19 Desember 2016 Pukul 21.15.00 Wib

<http://pantaupengadaan.org/files/Laporan%20Kajian%20Korupsi%20Pengadaan%20dan%20Rekomendasi%20Sanksi.pdf>, *Laporan Kajian Korupsi Pengadaan dan*

*Rekomendasi Sanksi*, hlm . 76, Diakses tanggal 27 Desember 2016 Pukul 21.00.00

W ib

<https://hidayatullahamad.wordpress.com/2013/06/24/makalah-ppkn-korupsi/>, Diakses

tanggal 17 Januari 2017 Pukul. 10.20.00 W ib

<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, Diakses tanggal

15 Januari 2017 Pukul: 11.25.15 W ib

<http://jeffersonsh.blogspot.com/2011/10/macam-macam-dan-pengelompokan-korupsi.html>,

Diakses tanggal 17 Januari 2017 Pukul. 11.20.00 W ib

<http://imansy.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>, Diakses

tanggal 15 Januari 2017 Pukul: 11.30.15 W ib

<http://nurulsolikha.blogspot.com/2011/03/upaya-pemberantasan-korupsi-di-hm1?m=1>.

Diakses Pada tanggal 18 Januari 2017 Pukul: 19.00.00 W ib

<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> Diakses

pada tanggal 9 Januari 2017 Pukul 10.15.20 W ib

[http://kupang.tribunnews.com/2011/08/01/tanggung-jawab-jabatan-dan-pidana-dana-bansos-](http://kupang.tribunnews.com/2011/08/01/tanggung-jawab-jabatan-dan-pidana-dana-bansos-sikka)

[sikka](http://kupang.tribunnews.com/2011/08/01/tanggung-jawab-jabatan-dan-pidana-dana-bansos-sikka), Diakses tanggal 18 Januari 2017 Pukul: 09.15.20 W ib

<http://ilmuhukumdasar.blogspot.co.id/2012/10/pertanggungjawaban-pidana.html>, Diakses

tanggal 15 Januari 2017 Pukul: 12.30.15 W ib

[http://fristianhumalangi.wordpress.com/2008/04/15/pertanggungjawaban-dalam-hukum-](http://fristianhumalangi.wordpress.com/2008/04/15/pertanggungjawaban-dalam-hukum-pidana)

[pidana](http://fristianhumalangi.wordpress.com/2008/04/15/pertanggungjawaban-dalam-hukum-pidana), Diakses tanggal 15 Januari 2017 Pukul: 14.30.15 W ib